

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Sekda: Optimalkan Serapan Anggaran

## Gelaran monev untuk melihat hasil capaian dan serapan anggaran dari setiap Perangkat Daerah lingkungan Pemprov Jakarta.

JAKARTA – Penyerapan anggaran yang dilakukan perangkat daerah diharapkan terus dioptimalkan dalam sisa anggaran tahun berjalan. Harapan ini muncul dalam

Gelaran Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan monev dilangsungkan di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (3/12). “Gelaran Monev APBD Tahun Anggaran 2024 untuk melihat hasil capaian dan serapan anggaran dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jakarta,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Marullah Matali.

“Kami ingin melihat Perangkat Daerah bekerja seoptimal mungkin hingga akhir tahun,”

tandasnya. Alokasi anggaran yang telah disediakan Pemprov diharapkan dapat terserap secara baik, proporsional, tepat guna, dan tepat waktu. Dia mengingatkan, masih ada waktu untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja.

“Saya sudah minta setiap perangkat daerah untuk memacu penyerapan sebaik-baiknya,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jakarta, Michael Rolandi

Cesnanta Brata, memaparkan, pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2024 mencapai 75 triliun.

Sedangkan realisasinya hingga 30 November baru 66,5 triliun atau sekitar 88,65 persen. Hingga akhir tahun, ditargetkan realisasi pendapatan daerah

mencapai 98,67 persen. Itu artinya, target 100 persen pendapatan tidak bakal terpenuhi.

Lebih lanjut Michael menjelaskan, anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD-P Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar 76 triliun. Sampai 30 November, anggaran belanja daerah yang terserap baru 52,4 triliun atau 82,67 persen. Sampai akhir tahun ditargetkan sebesar 70 triliun lebih atau sekitar 92,27 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, menambahkan, pendapatan daerah dari pajak yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2024 sebesar 44,98 triliun. Realisasi hingga 30 November sebesar 40,3 triliun atau sekitar 89,6 persen. Adapun target hingga akhir tahun mencapai 44 triliun atau sekitar 98 persen.

Selain itu, pendapatan dari sektor retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar 406 miliar. Realisasi per 30 November sebesar 450 miliar lebih atau sekitar 97,45 persen. Target hingga akhir tahun da-

pat mencapai 499,8 miliar atau sekitar 108 persen lebih.

### Lingkungan Hidup

Dalam bagian lain, Pemprov juga terus berupaya memperbaiki udara Jakarta. Salah satunya melalui Pemantauan Kepatuhan Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini dilakukan di Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Selasa (3/12).

“Pemantauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya uji emisi guna menjaga kualitas udara Jakarta. Ini juga sekaligus mengedukasi warga agar terus merawat kendaraan,” tutur Kepala DLH Provinsi Jakarta, Asep Kuswanto.

Menurutnya, pemantauan merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh kendaraan bermotor di Jakarta mematuhi standar baku mutu emisi.

Asep tengah menyiapkan tiga kebijakan utama yang akan mendorong pelaksanaan uji emisi. Ketiganya adalah pelaksanaan sanksi tilang elektro-

nik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya.

Kedua, penerapan disinsentif tarif parkir tertinggi. Ketiga, pengintegrasian pajak kendaraan bermotor berbasis pencemaran lingkungan. “Ini sebagai langkah agar masyarakat lebih memahami pentingnya uji emisi untuk perbaikan kualitas lingkungan,” tandas Asep.

Aartinya, ini bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama menjaga lingkungan. Asep juga menegaskan, ketiga kebijakan tersebut sejalan dengan regulasi seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009.

Dia member contoh, kendaraan yang tidak lulus uji emisi, nanti tidak hanya akan ditilang berbasis ETLE, tetapi juga dikenakan tarif parkir tertinggi, serta denda pajak tahunan yang terintegrasi. “Harapannya, ini menjadi dorongan positif agar warga Jakarta lebih tertib dalam memenuhi kewajiban,” tambahannya. ■ **Wid/G-1**



Scan untuk membaca artikel versi digital